

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerinci merupakan wilayah pedalaman dataran tinggi yang dikelilingi oleh rangkaian Pegunungan Bukit Barisan dan membentuk cekungan menyerupai kuali besar.¹ Letak geografis yang terisolasi ini menjadikan Kerinci relatif sulit dijangkau dari luar hingga awal abad ke-20. Kondisi tersebut bukan sekadar membentuk lanskap alam, tetapi juga membentuk watak sosial dan politik masyarakatnya. Alam dipahami bukan hanya sebagai ruang produksi dan penghidupan, melainkan sebagai ruang sakral yang dijaga melalui aturan adat. Dari sinilah lahir sebutan “Sakti Alam Kerinci,” sebuah ungkapan yang menegaskan kesatuan antara manusia, adat, dan lingkungan dalam kehidupan masyarakat Kerinci.²

Dalam ruang sosial yang demikian, adat menjadi fondasi utama tatanan masyarakat. Prinsip “*adat lamo pusako usang*” mengandung makna bahwa adat yang diwariskan leluhur tetap dijunjung sebagai sumber legitimasi dan pedoman hidup. Prinsip ini tidak berhenti pada tataran nilai, tetapi diwujudkan secara konkret melalui keberadaan harta pusaka yang diwariskan turun-temurun oleh para depati. Pusaka tersebut tidak hanya

¹ Muhammad Tory Prasetya, “‘Ndok Nginggong Neghui’: Ritual Asyeik Dalam Tradisi Suku Bangsa Kerinci (Studi Etnografi Suku Bangsa Kerinci Di Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi)” (Universitas Andalas, 2025), 1; Welly Rahmi, “Identifikasi Bangunan Kolonial Di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh” (Universitas Jambi, 2023), 1

² Arki Aulia Hadi dan Jamal Mirdad, “Perkembangan Museum Kerinci (Tinjauan Historis),” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 3, no. 1 (Juni 2021): 40

memiliki nilai simbolik, tetapi juga menjadi penanda kesinambungan otoritas serta legitimasi historis kepemimpinan pemerintah adat Kerinci.³

Struktur kepemimpinan adat ini dikenal dengan nama Depati IV Alam Kerinci. Depati IV Alam Kerinci merupakan pemerintahan adat tertua di Kerinci dan dianggap sebagai lembaga federasi yang mandiri.⁴ Pemerintahan Depati IV Alam Kerinci menempatkan para depati sebagai otoritas tertinggi yang bertindak sebagai perantara hubungan para depati di Kerinci dan dengan pihak kerajaan Jambi maupun kerajaan Inderapura.

Depati IV Alam Kerinci menjadikan Sanggarang Agung yang berada di tepi Danau Kerinci, sebagai pusat utama kerapatan adat dan ibu kota untuk mengadakan musyawarah serta membuat keputusan.⁵ Sanggarang Agung terletak di wilayah kekuasaan Depati Biang Sari, seorang yang merupakan salah satu Depati IV Alam Kerinci yang berpusat di Pengasi Lama. Dalam sistem pemerintahan adat, Depati Biang Sari bertindak sebagai Menteri Kehakiman.⁶ Oleh karena itu, wilayahnya menjadi tempat utama untuk menyelenggarakan kerapatan adat dan sebagai pusat pengambilan keputusan dalam struktur Depati IV Alam Kerinci. Namun, kondisi geografis Kerinci yang relatif tertutup

³ Arki Aulia Hadi dan Jamal Mirdad, "Perkembangan Museum Kerinci (Tinjauan Historis)," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 3, no. 1 (Juni 2021): 40

⁴ Iskandar Zakaria, *Tambo Sakti Alam Kerinci (Buku Pertama)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 19-21

⁵ Hafil Hadi Sunliensyar, Tanah, Kuasa, dan Niaga: Dinamika Relasi antara Orang Kerinci dan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sekitarnya dari Abad XVII hingga Abad XIX (Jakarta: Perpusnas Press, 2019), 19.

⁶ Aulia Tasman, *Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi*, 223.

menjadikan sistem kedepatian ini bertahan cukup lama tanpa intervensi langsung kekuasaan luar.

Situasi tersebut mulai berubah ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan ekspedisi militer dan penataan administratif ke Kerinci sekitar tahun 1902–1903, lalu memasukkan wilayah ini ke dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda.⁷ Sejak periode ini, kedudukan para depati mengalami pergeseran, dari pemegang otoritas adat yang relatif mandiri menjadi bagian dari sistem pemerintahan kolonial sebagai perantara antara masyarakat dan penguasa. Perubahan tersebut memunculkan dinamika baru dalam relasi kekuasaan lokal, terutama terkait bagaimana depati menyesuaikan peran, kewenangan, dan legitimasi adatnya di bawah kebijakan kolonial.⁸

Sejumlah penelitian tentang sejarah Kerinci pada masa kolonial umumnya menyoroti proses penaklukan Belanda, dan perlawanan baik masyarakat maupun tokoh kedepatian. Namun hingga saat ini, belum ditemukan penelitian sejarah yang secara khusus mengkaji Depati Biang Sari, sementara depati-depati lain dalam struktur Depati IV Alam Kerinci telah lebih dahulu disentuh dalam berbagai kajian.

Kekosongan ini menunjukkan adanya research gap dalam historiografi Kerinci, terutama pada tingkat mikro mengenai dinamika

⁷ Selvi Nurtinta Mardi, “Respons Masyarakat Kerinci Terhadap Politik-Ekonomi Pemerintahan Hindia-Belanda, 1903–1942” (Universitas Andalas, 2022), <https://scholar.unand.ac.id/117852/>.

⁸ Karina Oktavia Sitorus and et al., “Devide Et Impera: Kebijakan Politik Belanda Dalam Memecah Persatuan Di Nusantara,” *AR RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 315.

peranan Depati Biang Sari selama periode kolonial Belanda 1902–1942. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Depati Biang Sari mengalami perubahan posisi akibat kebijakan kolonial dan terlibat dalam proses adaptasi antara struktur adat dan pemerintahan kolonial. Dengan demikian, kajian ini diarahkan untuk merekonstruksi **“Dinamika Peranan Depati Biang Sari Kerinci Pada Masa Kolonial Belanda (1902–1942).”**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan maka penulis merumuskan masalah untuk memperoleh jawaban, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah

- a. Bagaimana Sejarah Asal-usul Depati Biang Sari?
- b. Bagaimana Perubahan Peranan Depati Biang Sari Dalam Struktur Adat Pada Masa Kolonial Belanda?

2. Batasan Masalah

Dalam rangka menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini memerlukan pembatasan yang jelas agar kajian terhadap Kedepatian Biang Sari tidak berkembang terlalu luas dan tetap relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, ditetapkan beberapa batasan yang mencakup aspek temporal, spasial, dan tematis sebagai landasan dalam mengarahkan keseluruhan pembahasan.

a. Batasan Temporal

Rentang waktu penelitian ini secara khusus dibatasi antara tahun 1902 hingga 1942, yakni sejak dimulainya intervensi dan penataan administratif pemerintah kolonial Belanda di Kerinci sampai berakhirnya kekuasaan Kolonial Belanda. Rentang ini dipilih karena dalam periode inilah terjadi perubahan paling intens terhadap struktur pemerintahan lokal dan posisi Kedepatian Biang Sari dalam kerangka kekuasaan kolonial.

b. Batasan Spasial

Secara spasial, penelitian ini difokuskan pada wilayah Kedepatian Biang Sari, yang merupakan bagian dari struktur Depati IV Alam Kerinci. Pusat kekuasaan yang berada di Desa Pengasi Lama, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Wilayah ini dipilih karena memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan adat di Kerinci dan menjadi salah satu lokasi yang terdampak langsung oleh kebijakan kolonial dalam bidang pemerintahan lokal dan pengelolaan masyarakat adat.

c. Batasan Tematis

Secara tematis, penelitian ini berfokus pada perubahan peranan depati Biang Sari perubahan peran dalam aspek politik, dan budaya yang terjadi akibat kebijakan dan praktik pemerintahan kolonial Belanda pada periode 1902–1942.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus permasalahan penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan secara historis Asal Usul Depati Biang Sari.
- b. Menganalisis Perubahan Peranan Depati Biang Sari dalam Struktur Adat Pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1902–1942.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dan memperkaya khazanah historiografi terkait kajian sejarah lokal, khususnya mengenai sistem kekuasaan adat di Kerinci pada masa kolonial melalui studi kasus Kedepatian Biang Sari.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan sejarah dan kebudayaan Kerinci. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik mengkaji sejarah Kerinci, sistem kedepatian, serta dinamika kekuasaan pada masa kolonial, khususnya yang berkaitan dengan Kedepatian Biang Sari.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi historis yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam upaya pelestarian nilai-nilai

adat serta penguatan identitas kultural Kerinci. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti sendiri mengenai sejarah lokal Kerinci, terutama terkait Kedepatian Biang Sari dan perubahan posisi kekuasaan pada masa kolonialisme.

D. Penjelasan Judul

Untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini, penulis merasa perlu terlebih dahulu menguraikan makna judul skripsi secara runtut dan terarah.

1. Dinamika

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinamika diartikan sebagai gerak atau tenaga yang menggerakkan, serta kekuatan yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁹ Pengertian ini menegaskan bahwa dinamika selalu berkaitan dengan adanya gerak aktif dari dalam masyarakat yang mendorong terjadinya perubahan.

Dinamika dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses perubahan peranan yang dialami oleh Depati Biang Sari dalam struktur kekuasaan masyarakat Kerinci. Perubahan peranan tersebut mencakup pergeseran fungsi, kewenangan, dan posisi social politik sebagai akibat dari interaksi antara sistem pemerintahan adat dan kekuasaan kolonial.

⁹ “Kata dinamika,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses 2 Januari 2026, <https://kbbi.web.id>

2. Peranan

Peranan dipahami sebagai seperangkat fungsi, tugas, dan perilaku yang diharapkan dijalankan oleh seseorang atau suatu institusi sesuai dengan kedudukannya dalam struktur sosial masyarakat. Dengan kata lain, peranan menunjukkan bagaimana suatu posisi diwujudkan secara nyata melalui tindakan dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial.¹⁰

Peranan dalam penelitian ini dimaknai sebagai fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Depati Biang Sari dalam struktur masyarakat Kerinci, baik sebagai pemimpin adat maupun sebagai bagian dari sistem kekuasaan yang lebih luas.

3. Depati Biang Sari

Istilah Depati mengandung makna kewenangan untuk memutus perkara adat. Pemahaman ini tercermin dalam saluko adat yang menyatakan “Depati dialah orang yang makan ngabih minum ngering mancung mutus”, yang menegaskan bahwa setiap persoalan adat yang diajukan dan diputuskan oleh Depati di rumah adat memiliki kekuatan hukum adat tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat.¹¹ Dalam struktur adat Kerinci, Depati Biang Sari menempati posisi yang sangat penting karena merupakan salah satu dari Depati IV Alam Kerinci dan dikenal sebagai depati tertua.

¹⁰ “Kata peranan,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses 2 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/>

¹¹ Mhd. Luthfi Alhamidi, “Elite Lokal Depati Muaro Langkap Di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci” (2024), 27

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai pemerintahan adat Kerinci, khususnya institusi Depati IV Alam, telah menarik perhatian sejumlah peneliti, meskipun cakupan pembahasannya belum merata. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perhatian akademik lebih banyak diarahkan pada depati tertentu seperti Depati Muaro Langkap, Depati Atur Bumi (Hiang), dan Depati Rencong Telang.

Dalam skripsi Alhamidi (2024), Kajiannya mengenai *Elite Lokal Depati Muaro Langkap Di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci*, yang menempatkan depati sebagai aktor utama dalam menjaga keseimbangan sosial, memediasi konflik, serta mentransmisikan pengetahuan adat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kerangka konseptual tersebut penting sebagai landasan untuk membaca bagaimana peranan depati dapat mengalami perubahan atau justru bertahan ketika berhadapan dengan kekuasaan kolonial. Namun, kajian tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembahasan mendalam masih terfokus pada depati tertentu, sementara Depati Biang Sari hanya disebutkan secara sekilas sebagai bagian dari struktur Depati IV Alam Kerinci.¹²

Kajian lain mengenai Depati Atur Bumi atau Mendapo Hiang, khususnya disertasi yang ditulis oleh Morison pada 1940 *De Mendapo Hiang in het District Korintji*, memberikan gambaran penting mengenai keterbatasan dokumentasi awal tentang Kerinci. Morison menegaskan

¹² Mhd. Luthfi Alhamidi, "Elite Lokal Depati Muaro Langkap Di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci" (2024).

bahwa wilayah Kerinci relatif terlambat mendapat perhatian administratif dan akademik dari pemerintah kolonial Belanda, sehingga banyak informasi mengenai struktur adat dan kepemimpinan lokal baru dicatat setelah Belanda secara efektif menguasai wilayah ini sekitar tahun 1903. Kondisi ini menyebabkan masih terbukanya ruang kajian terhadap berbagai aspek pemerintahan adat, termasuk peranan depati yang belum terdokumentasi secara sistematis . Dalam konteks ini, absennya kajian khusus mengenai Depati Biang Sari dapat dipahami bukan sebagai ketiadaan peran historis, melainkan sebagai akibat dari keterbatasan perhatian penelitian sebelumnya.¹³

Sementara itu, penelitian tentang Depati Rencong Telang yang dilakukan oleh Tri Siswoyono (2022) *Analisis Batu Silindrik Dataran Tinggi Jambi di Wilayah Adat Depati Rencong Telang* . Melalui kajiannya Tradisi Kenduri Sko memperlihatkan bagaimana praktik budaya berfungsi sebagai sarana legitimasi kekuasaan adat. Tradisi tersebut tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga menjadi mekanisme penguatan struktur kepemimpinan depati dan ninik mamak dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan depati dapat ditelusuri melalui praktik-praktik sosial dan budaya yang mengiringi kepemimpinannya.¹⁴

¹³ Morison, H. H, "De Mendapo Hiang in het District Korintji (Disertasi). Rechtshoogeschool te Batavia." (1940).

¹⁴ Tri Siswoyo, *Analisis Batu Silindrik Dataran Tinggi Jambi di Wilayah Adat Depati Rencong Telang* (Skripsi S1, Program Studi Arkeologi, Jurusan Sejarah Seni dan Arkeologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, 2022).

Di sisi lain, kajian mengenai kolonialisme Belanda di Kerinci telah cukup berkembang, terutama yang menyoroti fase awal penetrasi kolonial dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Darmawan (2021) *Peran ulama dalam perjuangan masyarakat Kerinci melawan kolonial Belanda (1903–1904)*. Kajiannya membahas Perang Kerinci 1901–1903 sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap intervensi kolonial yang dinilai mengancam tatanan adat, agama, dan ekonomi lokal. Perang ini dipicu oleh perubahan struktur pemerintahan tradisional, monopoli perdagangan, serta masuknya kepentingan kolonial ke wilayah Kerinci. Dampaknya tidak hanya berupa kekalahan militer, tetapi juga transformasi sosial dan politik yang melemahkan kedaulatan lembaga adat, termasuk posisi para depati.¹⁵

Kajian lanjutan mengenai periode kolonial 1903–1942, seperti yang dilakukan oleh Mardi (2022) *Respons masyarakat Kerinci terhadap politik-ekonomi pemerintahan Hindia-Belanda, 1903–1942*, memperlihatkan bahwa kekuasaan Belanda di Kerinci tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga membawa perubahan dalam struktur ekonomi melalui pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan. Respons masyarakat terhadap kebijakan kolonial bersifat beragam, mulai dari penerimaan terhadap peluang ekonomi hingga penolakan terhadap dominasi perdagangan dan pajak. Dalam konteks ini, peranan elite lokal,

¹⁵ Darmawan, B. (2021). *Peran ulama dalam perjuangan masyarakat Kerinci melawan kolonial Belanda (1903–1904)* (Tesis). Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

termasuk depati, menjadi penting sebagai penghubung antara kepentingan kolonial dan masyarakat adat, meskipun kajian tersebut belum secara spesifik menyoroti peranan masing-masing depati secara individual.¹⁶

Tesis Yova Sandra berjudul *Sistem Pemerintahan Tradisional Mendapo*, Menelusuri Sejarah yang Hilang dalam Masyarakat Kerinci menjelaskan bahwa mendapo merupakan simbol kultural masyarakat Kerinci yang memuat nilai adat-istiadat dan demokrasi komunitarian, tetapi keberadaannya mulai tergerus sejak masa kolonial dan makin hilang pasca kemerdekaan karena hegemoni kekuasaan eksternal (Kolonial Belanda, Jepang, lalu kebijakan sentralisasi uniformitas negara) serta faktor internal berupa lemahnya perhatian pemerintah daerah dan dukungan sebagian masyarakat. Dampaknya ialah melemahnya nilai-nilai adat dan mudarnya memori kolektif tentang pemerintahan tradisional. Temuan ini juga memberi gambaran bahwa kontrol Belanda terhadap Kerinci tidak lepas dari strategi pengelolaan kekuasaan local termasuk praktik pecah-belah (*divide et impera*).¹⁷

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai Depati IV Alam Kerinci telah berkembang namun masih menunjukkan ketimpangan fokus kajian. Depati Biang Sari, meskipun diakui sebagai salah satu depati tertua dan penting dalam struktur adat Kerinci, belum memperoleh kajian khusus yang menelusuri

¹⁶ Mardi, S. N. (2022). Respons masyarakat Kerinci terhadap politik-ekonomi pemerintahan Hindia-Belanda, 1903–1942. (Tesis). Universitas Andalas.

¹⁷ Sandra, Y. (2023). *Sistem pemerintahan tradisional mendapo: Menelusuri sejarah yang hilang dalam masyarakat Kerinci* (Tesis). Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

dinamika peranannya di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sementara itu, studi kolonial di Kerinci lebih banyak menekankan aspek konflik, ekonomi, dan kebijakan umum tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan transformasi peranan depati tertentu. Oleh karena itu, penelitian mengenai **“Dinamika Peranan Depati Biang Sari Kerinci Pada Masa Kolonial Belanda (1902–1942),”** menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dan memperkaya pemahaman tentang interaksi antara kekuasaan adat dan kolonial pada tingkat lokal.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sejarah seperti yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo, metode ini dipilih karena fokus penelitian berkaitan erat dengan warisan budaya dan adat yang terbentuk dari perjalanan sejarah masyarakat. Pendekatan historis Kuntowijoyo menekankan pentingnya rekonstruksi peristiwa masa lalu agar dapat dipahami dalam konteks masa kini. Kuntowijoyo mengusulkan empat tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Selain menyoroti fakta dan kronologi, pendekatan ini juga menekankan pentingnya memahami sejarah sebagai pengalaman manusia yang mengandung emosi, nilai, dan identitas.¹⁸

1. Heuristik

Menurut Adlini, 2022 heuristik atau pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mencari dan menkonstruksikan dari berbagai

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 173-79.

sumber seperti buku, jurnal, artikel dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sumber tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sumber berdasarkan bentuk, sumber berdasarkan sifat, dan sumber berdasarkan asal.¹⁹

Sumber Sejarah Berdasarkan Bentuk

Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda (visual).

a) Sumber Tertulis

Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang berbentuk tulisan, baik yang ditulis secara manual maupun dicetak. Dalam penelitian ini, sumber tertulis diperoleh melalui studi pustaka (library research), meliputi buku-buku yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Pusat UIN Imam Bonjol Padang. Selain itu, jurnal ilmiah diakses melalui Google Scholar, serta skripsi terdahulu diperoleh dari Repository UIN Imam Bonjol Padang.

b) Sumber Lisan

Sumber lisan adalah keterangan yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Dalam penelitian ini, sumber lisan

¹⁹Adlini, dkk. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." Jurnal Pendidikan: EDUMAPSUL. Vol. 6. No. 1

diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat yang memiliki pengetahuan mengenai objek penelitian.

c) Sumber Visual

Sumber benda atau visual merupakan sumber sejarah yang berbentuk foto, arsip gambar, atau dokumen visual lainnya. Dalam penelitian ini, sumber visual diperoleh dari arsip digital Delpher (arsip Belanda), berupa dokumentasi historis berupa foto dan surat kabar lama.

Sumber Sejarah Berdasarkan Sifat

a) Sumber Primer

Sumber primer berupa data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya.²⁰ Data primer dalam penelitian ini berupa sumber-sumber kolonial Belanda yang berkaitan dengan wilayah Kerinci pada awal abad ke-20, khususnya periode 1902–1942. Sumber primer yang digunakan meliputi laporan surat kabar kolonial dan dokumen resmi pemerintah kolonial berupa Koloniaal Verslag van Nederlandsch-Indië, yang diakses melalui Delpher. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti “Kerintji”, “Korintji”, “Depati”, serta istilah administratif kolonial lainnya untuk menemukan data yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk merekonstruksi kronologi

²⁰ Firdaus dan Fakhri Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hal. 105

ekspedisi militer, kebijakan kolonial, dan perubahan kedudukan *elite* adat di Kerinci.

Selain arsip resmi, penelitian ini juga memanfaatkan karya-karya sezaman sebagai sumber primer pendukung, antara lain disertasi H.H. Morison (1940) dan laporan administratif A.Ph. van Aken (1915). Kedua sumber ini memberikan gambaran mengenai struktur pemerintahan kolonial, kondisi sosial masyarakat, serta sistem adat di Distrik Kerinci pada masa tersebut. Karya-karya ini digunakan untuk memperkaya deskripsi mengenai relasi antara pemerintahan kolonial dan elite adat setempat.

b) Sumber Sekunder

Peneliti merancang pengumpulan sumber sekunder melalui pendekatan studi kepustakaan. Dalam proses ini, peneliti secara aktif merencanakan penelusuran terhadap referensi yang berkaitan dengan objek kajian. Menurut Sugiyono (2013), studi kepustakaan merupakan bagian penting dalam penelitian karena memuat kajian teoritis dan sumber ilmiah yang mendukung pemahaman terhadap objek yang dikaji. Oleh karena itu, peneliti menempatkan studi kepustakaan sebagai pijakan awal dalam merancang kerangka analisis. Data yang relevan dengan permasalahan penelitian diperoleh dari berbagai

sumber pustaka seperti buku, jurnal, Skripsi, dan Tesis yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran sumber secara langsung maupun daring. Secara daring, peneliti memanfaatkan platform akademik seperti Google Scholar untuk mengakses artikel jurnal ilmiah, buku elektronik, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian dengan menggunakan kata kunci seperti “Kerinci”, “Depati”, “elite adat”, dan “kolonialisme Belanda”. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan koleksi dan layanan digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) guna memperoleh buku yang mendukung kajian.

Penelusuran sumber juga dilakukan secara langsung di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Perpustakaan ini menyediakan koleksi buku dan skripsi yang berkaitan dengan sejarah lokal, sejarah kolonial, serta kajian adat dan kebudayaan. Melalui penelusuran katalog dan koleksi fisik perpustakaan, peneliti memperoleh referensi yang relevan untuk memperkuat kerangka teoritis dan historiografis penelitian.

Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk membangun landasan teoritis, memahami perkembangan historiografi, serta memperkuat analisis terhadap data

²¹ Ansori, Zakaria Yoyo. (2019). “Islam dan Pendidikan Multikultural”. Jurnal Cakrawala Pendas: Media Publikasi pada Bidang Pendidikan Dasar. Vol.5. No.2

primer. Dengan demikian, studi kepustakaan dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar konseptual yang mendukung keseluruhan proses penelitian.

Untuk melengkapi sumber tertulis, peneliti juga melakukan wawancara dengan pemangku adat yang memahami sejarah kedepatian Biang Sari, guna memperoleh keterangan mengenai tradisi lisan dan ingatan kolektif masyarakat terkait peranan Depati Biang Sari. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara dengan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban secara bebas sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama kedudukan adat dan pengetahuan historis yang dimiliki. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahar, Depati Karang Pandan (20 November 2025);
- 2) Harmin, Uhang Tuo Cerdik Pandai Pulau Pandan (16 November 2025);
- 3) Marhum, Depati Biang Sari (15 November 2025);
- 4) Mudarsi, Rio Ganti Dirajo Muak (18 November 2025).

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) di lokasi informan. Sebelum wawancara dimulai, peneliti menjelaskan tujuan penelitian serta meminta persetujuan informan untuk mendokumentasikan percakapan. Data hasil wawancara kemudian ditranskripsikan dan dianalisis.

Sumber Sejarah Berdasarkan Asal

a) Sumber Sezaman

Sumber sezaman adalah sumber yang dibuat pada masa terjadinya peristiwa sejarah yang diteliti. Sumber ini memiliki kedekatan waktu dengan peristiwa sehingga memiliki nilai penting dalam merekonstruksi fakta sejarah.

Dalam penelitian ini, sumber sezaman meliputi arsip kolonial Belanda yang berkaitan dengan wilayah Kerinci pada periode 1902–1942, seperti Koloniaal Verslag van Nederlandsch-Indië, laporan administratif A.Ph. van Aken (1915), serta surat kabar kolonial yang diakses melalui Delpher. Selain itu, disertasi H.H. Morison (1940) juga termasuk sumber sezaman karena ditulis pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan menggambarkan kondisi sosial serta struktur pemerintahan di Kerinci pada periode tersebut.

Sumber-sumber ini digunakan untuk merekonstruksi kronologi ekspedisi militer, kebijakan kolonial, serta perubahan kedudukan elite adat di Kerinci pada awal abad ke-20.

b) Sumber Tidak Sezaman

Sumber tidak sezaman adalah sumber yang dibuat setelah peristiwa yang diteliti berlangsung. Sumber ini biasanya berupa hasil kajian, interpretasi, atau ingatan terhadap peristiwa masa lalu.

Dalam penelitian ini, sumber tidak sezaman meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang ditulis oleh peneliti setelah periode kolonial berakhir. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui Google Scholar, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang serta Perpustakaan Pusat UIN Imam Bonjol.

Selain itu, hasil wawancara dengan para pemangku adat juga termasuk sumber tidak sezaman, karena keterangan yang diberikan merupakan bentuk ingatan kolektif dan tradisi lisan mengenai peristiwa yang terjadi pada masa kolonial. Meskipun tidak sezaman, sumber-sumber ini tetap memiliki nilai historis yang penting, terutama dalam memahami interpretasi lokal serta perkembangan historiografi mengenai peranan Depati Biang Sari pada masa kolonial Belanda.

2. Kritik Sumber

Menurut Kuntowijoyo 2013 setelah pengumpulan sumber, tahap selanjutnya adalah verifikasi sumber atau pengujian keabsahan sumber baik autentisitas maupun kredibilitas sumber.²² Verifikasi ini

²² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 78

dilakukan melalui dua jenis kritik, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berkaitan dengan uji autentisitas atau keaslian sumber. Untuk sumber tulisan, verifikasi dilakukan dengan meneliti fisik dokumen, jenis kertas, tahun penerbitan, cap atau tanda tangan resmi, serta gaya bahasa yang digunakan. Sedangkan untuk foto, kritik ekstern melibatkan pemeriksaan terhadap elemen visual seperti kualitas cetakan, label atau keterangan pada bagian foto, serta konteks waktu dan tempat pengambilan gambar. Sementara untuk sumber lisan, autentisitas ditinjau dari kejelasan identitas narasumber, dan konsistensi pernyataannya dengan fakta-fakta lain.

Sementara itu, kritik intern bertujuan untuk menguji kredibilitas isi sumber, yaitu sejauh mana informasi dalam dokumen tersebut dapat dipercaya. Dalam tahap ini, peneliti menilai siapa penulis atau penyusun sumber tersebut, apa latar belakangnya, untuk siapa sumber itu ditujukan, serta apakah terdapat bias, kecenderungan subjektif, atau kontradiksi dalam isi sumber. Kritik intern membantu peneliti memahami maksud sebenarnya dari informasi yang disampaikan serta menilai kebenaran dan ketepatan faktual dari isi sumber.²³

Dalam tahap ini arsip kolonial tidak dipahami sebagai cerminan objektif realitas sejarah, melainkan sebagai produk kekuasaan yang memuat sudut pandang penguasa kolonial. Oleh karena itu, peneliti

²³ Rahman, Fatchor. 2017. Menimbang Sejarah sebagai Landasan Kajian Ilmiah; sebuah Wacana Pemikiran dalam Metode Ilmiah, EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Volume 7, Nomor 1, hal. 140.

melakukan pembacaan silang (*cross-checking*) antara sumber kolonial dengan sumber lokal, baik berupa tradisi lisan, keterangan tokoh adat, maupun sumber-sumber sekunder yang ditulis dari perspektif masyarakat pribumi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi bias kolonial dan memperoleh gambaran yang lebih seimbang mengenai dinamika peranan Depati Biang Sari pada masa kolonial Belanda.

a) Kritik terhadap sumber primer

Kritik ekstern dilakukan untuk memastikan keaslian sumber. Terhadap surat kabar kolonial dan Koloniaal Verslag, verifikasi dilakukan dengan memeriksa tahun terbit, identitas penerbit, serta kesesuaiannya dengan periode penelitian (1902–1942). Arsip diperoleh melalui platform resmi Delpher sehingga autentisitas dokumen dapat dipertanggungjawabkan secara kronologis dan administratif. Laporan Van Aken (1915) dan disertasi Morison (1940) diverifikasi melalui identitas penulis, institusi, serta konteks penerbitannya pada masa kolonial.

Contohnya Kritik ekstern terhadap karya H.H. Morison, *De Mendapo Hiang in het District Korintji* (1940). Karya ini merupakan disertasi yang ditulis di Rechtshoogeschool te Batavia pada tahun 1940, sehingga secara kronologis termasuk sumber sezaman dengan akhir periode kolonial di Hindia Belanda. Statusnya sebagai karya akademik resmi dalam lingkungan pendidikan hukum kolonial menunjukkan bahwa sumber ini autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Dengan

demikian, dari segi keaslian dan konteks historis, karya Morison memenuhi syarat sebagai sumber yang sah.

Adapun kritik intern dilakukan dengan menelaah isi dan perspektif yang digunakan dalam karya tersebut. Morison menulis dalam kerangka hukum kolonial dan tradisi kajian hukum adat (*adatrechtelijke verhandelingen*), sehingga struktur mendapo dan kedudukan elite adat dipahami dalam konteks administrasi kolonial. Relasi antara pemerintah kolonial dan elite adat cenderung digambarkan sebagai proses penataan administratif yang berjalan relatif stabil, tanpa analisis mendalam mengenai kemungkinan dominasi atau ketegangan struktural. Oleh karena itu, meskipun karya Morison memberikan deskripsi yang sistematis dan rinci mengenai struktur adat di Kerinci, isinya tetap dibaca secara kritis dengan mempertimbangkan bias perspektif kolonial serta dibandingkan dengan sumber lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih seimbang.

b) Kritik terhadap sumber primer

Kritik ekstern terhadap sumber sekunder dilakukan dengan memeriksa identitas penulis, tahun terbit, penerbit atau jurnal tempat publikasi, serta relevansinya dengan tema penelitian. Peneliti mengutamakan karya ilmiah yang memiliki kredibilitas akademik, baik yang diterbitkan oleh penerbit resmi maupun jurnal ilmiah yang terverifikasi.

Kritik ekstern terhadap sumber wawancara dilakukan dengan memastikan identitas dan otoritas narasumber. Informan dalam penelitian ini merupakan tokoh adat yang memiliki kedudukan struktural dalam masyarakat, seperti Depati dan Rio, sehingga secara sosial memiliki legitimasi dalam menyampaikan informasi mengenai sejarah kedepatian dan struktur adat. Kejelasan identitas, posisi adat, serta keterlibatan mereka dalam lingkungan sosial budaya setempat menjadi dasar bahwa sumber lisan tersebut autentik dan relevan dengan objek penelitian.

Kritik intern dilakukan dengan menilai argumentasi, metodologi, dan konsistensi analisis dalam setiap karya yang digunakan. Sumber sekunder tidak digunakan sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai bahan pembandingan, serta alat untuk memahami perkembangan kajian yang telah ada.

kritik intern terhadap informan dilakukan dengan menelaah isi keterangan yang disampaikan narasumber. Peneliti menyadari bahwa sumber lisan sangat dipengaruhi oleh ingatan, pengalaman personal, serta sudut pandang subjektif. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh tidak diterima secara langsung, melainkan dibandingkan antar narasumber dan dicocokkan dengan sumber tertulis kolonial maupun literatur ilmiah. Dengan melakukan pembacaan silang (cross-checking), data wawancara digunakan secara selektif untuk melengkapi dan menyeimbangkan perspektif arsip kolonial.

3. Interpretasi

Interpretasi sumber, yaitu menafsirkan secara kritis dan mendalam terhadap data yang diperoleh agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya. Menurut Suemayono 1990, interpretasi adalah usaha untuk mengungkap makna yang masih terselubung.²⁴ Tahap interpretasi dalam penelitian sejarah terbagi ke dalam dua proses utama. Pertama Analisis atau kegiatan memilah, menguraikan, dan mengkaji fakta-fakta data sejarah yang ditemukan. Kedua, Sintesis, yaitu kegiatan menyusun kembali potongan-potongan data hasil analisis menjadi satu kesatuan narasi atau pemikiran yang utuh.²⁵

Dalam tahap interpretasi, peneliti menganalisis data-data yang diperoleh dari bahan pustaka, arsip kolonial, surat kabar, serta sumber lokal dan tradisi lisan secara kritis dan kontekstual. Untuk memperkuat pembacaan tersebut, peneliti menggunakan pola politik *divide et impera* sebagai kerangka analitis dalam mengkaji pola kebijakan kolonial Belanda. Kerangka ini digunakan untuk membantu memahami bagaimana kebijakan kolonial dijalankan berpengaruh terhadap perubahan peranan Depati Biang Sari.

Dalam tahap interpretasi, peneliti melakukan proses penafsiran terhadap seluruh data yang telah melalui tahap kritik sumber secara sistematis dan kontekstual. Interpretasi tidak dilakukan secara langsung

²⁴ Supardi & Hizmi, 2024, Metode Interpretasi di Desa Wisata Ende, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vo. 4, No.1

²⁵Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 78-80.

terhadap keseluruhan data, melainkan diawali dengan proses analisis, yaitu memilah dan mengelompokkan fakta-fakta sejarah berdasarkan tema dan periodisasi waktu. Data yang diperoleh dari arsip kolonial, surat kabar, karya Morison dan Van Aken, serta hasil wawancara dengan tokoh adat diklasifikasikan ke dalam tema-tema seperti kebijakan militer dan administrasi kolonial, perubahan struktur mendapo, kedudukan elite adat, serta relasi antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal.

Dalam proses analisis tersebut, peneliti membandingkan informasi antar-sumber untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan narasi. Bahasa dan istilah yang digunakan dalam arsip kolonial dibaca secara kritis dengan memperhatikan konteks politik dan kepentingan kekuasaan yang melatarbelakanginya. Untuk memperdalam pemahaman terhadap pola kebijakan kolonial, peneliti menggunakan kerangka politik divide et impera sebagai alat analitis. Melalui kerangka ini, peneliti menafsirkan bagaimana kebijakan kolonial dijalankan dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi perubahan peranan Depati Biang Sari dalam struktur adat Kerinci.

Setelah tahap analisis dilakukan, peneliti memasuki tahap sintesis, yaitu menyusun kembali fakta-fakta yang telah dikaji ke dalam konstruksi sejarah yang utuh. Dalam tahap ini, peneliti menghubungkan kronologi ekspedisi militer dengan restrukturisasi pemerintahan adat, serta menjelaskan hubungan sebab-akibat antara intervensi administratif kolonial dan transformasi kedudukan Depati

Biang Sari. Melalui sintesis tersebut, berbagai potongan data dirangkai menjadi narasi historis yang argumentatif dan menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, interpretasi dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan peristiwa secara deskriptif, tetapi juga mengungkap dinamika relasi kuasa yang memengaruhi perubahan struktur adat pada masa kolonial Belanda.

4. Historiografi

Menurut Abdurrahman historiografi adalah cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan, dari penulisan itu akan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal (fase perencanaan) sampai dengan akhirnya (penarikan kesimpulan).²⁶ Dalam penelitian sejarah, proses rekonstruksi peristiwa masa lalu tidak hanya mengandalkan fakta-fakta kronologis, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan pengalaman individu yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap utama heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi sering kali dikombinasikan dengan pendekatan lain yang mendukung pendalaman makna atas data yang diperoleh. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

Menurut Leksono Sonny, pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang berfungsi untuk memahami dan

²⁶ Nurhayati, (2016), *Penulisan Sejarah (Historiografi): Mewujudkan Nilai-nilai Kearifan Kearifan Budaya Lokal Menuju Abad 21*. Vo;. 1, No. 1, Hal. 257.

menguraikan suatu masalah berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumen. Dengan pendekatan ini, peneliti sejarah tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga berusaha menggambarkan dan menafsirkan realitas masa lalu sebagaimana dipahami oleh para pelaku dan saksi sejarah. Pendekatan ini berfungsi untuk memahami dan menguraikan suatu masalah berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, maupun dokumen. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat.²⁷

Tahap historiografi dalam penelitian ini merupakan proses penulisan dan penyusunan hasil penelitian sejarah secara sistematis dan argumentatif. Mengacu pada pendapat Abdurrahman, historiografi dipahami sebagai cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang menggambarkan secara jelas keseluruhan proses penelitian sejak tahap perencanaan hingga penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini historiografi tidak hanya berfungsi sebagai tahap akhir penyusunan laporan, tetapi juga sebagai proses rekonstruksi sejarah yang berlandaskan pada hasil heuristik, verifikasi, dan interpretasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Secara teknis, penulis menyusun historiografi dengan merangkai fakta-fakta yang telah dianalisis dan disintesis ke dalam bentuk narasi kronologis dan tematis. Fakta-fakta yang diperoleh dari

²⁷ Iskandar Zakaria, Tambo Sakti Alam Kerinci (Buku Pertama) (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

arsip kolonial, surat kabar, karya ilmiah sezaman, serta wawancara dengan tokoh adat tidak disajikan secara terpisah, melainkan dihubungkan dalam alur cerita sejarah yang runtut. Penulisan dilakukan dengan memperhatikan urutan waktu peristiwa serta dinamika perubahan yang terjadi, sehingga pembaca dapat memahami perkembangan peranan Depati Biang Sari dalam konteks kolonial secara berkesinambungan.

Dalam proses penulisan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Leksono Sonny. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya menyajikan data dalam bentuk fakta kronologis, tetapi juga menggambarkan realitas sosial dan makna peristiwa sebagaimana dipahami oleh para pelaku sejarah dan masyarakat setempat. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang dirangkai menjadi kalimat-kalimat analitis, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai interaksi antara struktur adat dan kebijakan kolonial.

Selain itu, dalam tahap historiografi penulis berupaya menjaga keseimbangan antara sumber kolonial dan sumber lokal. Narasi tidak semata-mata mengikuti sudut pandang arsip kolonial, tetapi juga memasukkan perspektif masyarakat adat yang diperoleh melalui tradisi lisan. Dengan cara ini, rekonstruksi sejarah yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperlihatkan dinamika

sosial dan relasi kuasa yang memengaruhi perubahan peranan Depati Biang Sari.

Dengan demikian, cara kerja penulis dalam tahap historiografi adalah menyusun hasil analisis dan sintesis ke dalam narasi sejarah yang runtut, argumentatif, dan kontekstual, serta menyajikannya dalam bentuk deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai peristiwa yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tersaji secara runtut dan mudah dipahami, penulisan disusun ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga bab utama, dan setiap bab dirinci lagi ke dalam beberapa subbab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk membingkai landasan teoritis dan metodologis secara utuh.

Bab II Kerinci Pada Masa Awal Kekuasaan Kolonial Belanda menguraikan fondasi historis dengan dua subbab utama, yaitu geografi wilayah Kedeptian Biang Sari yang menjelaskan luasnya tanah ulayat dan

batas-batas adat, serta tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan agama masyarakat wilayah tersebut yang dibagi menjadi kondisi sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan sosial-agama guna memberikan konteks pra-kolonial yang komprehensif.

Bab III Kedepatian Biang Sari pada Masa Kolonial Belanda

membahas dinamika inti penelitian melalui tiga subbab, yakni sejarah Kedepatian Biang Sari (asal-usul Depati Biang Sari, struktur organisasi kedepatian, serta posisinya dalam Depati IV Alam Kerinci), masuknya Belanda ke wilayah tersebut (awal kontak Belanda dengan Kerinci dan ekspedisi militer 1903), serta dinamika peranan Depati Biang Sari di bawah kekuasaan kolonial (penataan ulang pemerintahan adat Kerinci dan pelemahan otoritas Depati Biang Sari) yang menjadi fokus analisis utama.

Bab IV Penutup merangkum kesimpulan, saran, dan

keterbatasan penelitian untuk menutup narasi secara reflektif dan membuka ruang bagi studi lanjutan.